

EPISTEMOLOGI POLITIK DI BANGKU SD: DUALISME PERAN GURU SEBAGAI AGEN KEBENARAN DAN KEKUASAAN

Eva Siti Fauziyyah¹, Kokom Komalasari², Candra Dewi Asih Pamungkas³,
Jaenuri⁴,

^{1,2,3,4}S2 PGSD Universitas Pendidikan Indonesia

1evasifa84@upi.edu, 2kkm.kmlsr82@upi.edu, 3candradewi@upi.edu,

4jaenuri@upi.edu

ABSTRACT

Political education at the elementary school level plays a strategic role in shaping children's understanding of the state, power, and democratic life. However, political learning in elementary schools is still dominated by normative and rote learning approaches, especially regarding state symbols, government structures, and moral rules, leaving no room for the development of critical thinking skills. This article examines how political epistemology is constructed through the curriculum, textbooks, and pedagogical practices, as well as how teachers play a dual role as agents of truth and agents of power. This study uses a Systematic Literature Review (SLR) approach to thirty articles published between 2020 and 2025 to map epistemological patterns, knowledge-power relations, and opportunities for developing critical political literacy in elementary school students. The results show that the construction of political knowledge in elementary schools is still one-way, declarative, and non-dialogical, influenced by hierarchical school structures and learning practices that prioritize obedience. Textbooks reinforce simplistic and idealistic political narratives. However, various studies reveal that students have the epistemic potential to understand political issues reflectively if learning provides space for dialogue, contextual experiences, and participatory approaches. This study emphasizes that reconstructing political epistemology through curriculum reform, capacity building, and participatory approaches are important steps in developing critical political literacy among elementary school students.

Keywords: political epistemology, teachers, political literacy, elementary schools, critical pedagogy.

ABSTRAK

Pendidikan politik pada jenjang sekolah dasar memiliki peran strategis dalam membentuk cara anak memahami negara, kekuasaan, dan kehidupan demokratis. Namun, pembelajaran politik di SD masih didominasi pendekatan normatif dan hafalan, terutama terkait simbol negara, struktur pemerintahan, dan aturan moral, sehingga tidak memberi ruang bagi pengembangan kemampuan berpikir kritis. Artikel ini mengkaji bagaimana epistemologi politik dibangun melalui kurikulum, buku teks, dan praktik pedagogis, serta bagaimana guru memainkan peran ganda sebagai agen kebenaran sekaligus agen

kekuasaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) terhadap tiga puluh artikel terbitan 2020–2025 untuk memetakan pola epistemologis, relasi pengetahuan–kekuasaan, dan peluang pengembangan literasi politik kritis pada siswa sekolah dasar. Hasil kajian menunjukkan bahwa konstruksi pengetahuan politik di SD masih bersifat satu arah, deklaratif, dan tidak dialogis, dipengaruhi oleh struktur sekolah yang hierarkis serta praktik pembelajaran yang mengutamakan kepatuhan. Buku teks turut memperkuat narasi politik yang simplifikatif dan idealistik. Meskipun demikian, berbagai penelitian mengungkap bahwa siswa memiliki potensi epistemik untuk memahami isu politik secara reflektif apabila pembelajaran memberi ruang dialog, pengalaman kontekstual, dan pendekatan partisipatif. Kajian ini menegaskan bahwa rekonstruksi epistemologi politik melalui pembaruan kurikulum, peningkatan kapasitas guru, dan penciptaan ruang belajar yang lebih emansipatoris sangat penting untuk menumbuhkan literasi politik kritis sejak dini dan memperkuat fondasi kehidupan demokratis.

Kata Kunci: epistemologi politik, guru, literasi politik, sekolah dasar, pedagogi kritis.

A. Pendahuluan

Sebagai bagian awal dari pembentukan kesadaran politik anak, pendidikan dasar memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam konteks sosial-politik Indonesia yang semakin kompleks, anak tidak lagi hidup dalam ruang yang steril dari peristiwa publik, melainkan berinteraksi dengan media digital, percakapan keluarga, dan pengalaman sosial yang sarat dengan nilai politik. Kondisi ini menuntut adanya pembelajaran politik yang tidak hanya menyampaikan konsep dasar, tetapi juga membangun kemampuan anak untuk menafsirkan realitas secara kritis. Dengan demikian, pembentukan epistemologi politik di

jenjang SD tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan mendesak untuk membekali anak dengan kemampuan literasi politik yang relevan, terutama dalam menghadapi dinamika era post-truth yang rentan terhadap bias, misinformasi, dan polarisasi.

Pendidikan dasar merupakan fase kognitif dan sosial yang menentukan arah terbentuknya kerangka berpikir politik anak. Pada usia sekolah dasar, anak mulai membangun pemahaman awal mengenai negara, kekuasaan, partisipasi, dan kewarganegaraan melalui interaksi dengan keluarga, media digital, lingkungan sosial, dan sekolah (Sihotang & Mustika, 2024). Namun, karena keterbatasan literasi kritis dan kemampuan memilah

informasi, sekolah terutama guru menjadi aktor epistemik utama yang membentuk cara anak memahami dunia politik.

Dalam konteks era post-truth yang ditandai banjir informasi, algoritma media sosial, dan meningkatnya disinformasi, pendidikan politik sejak dini menjadi sangat mendesak (Karolčík et al., 2025). Anak SD kini terpapar wacana politik melalui TikTok, YouTube, televisi, dan percakapan rumah tangga tanpa kemampuan kognitif untuk membedakan fakta, opini, atau propaganda. Situasi ini menempatkan guru sebagai penentu kebenaran yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membentuk struktur epistemologi politik yang akan menetap hingga usia dewasa (Mujiyanto et al., 2025).

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa epistemologi politik yang diajarkan di SD masih bersifat normatif-prosedural: siswa diminta menghafal simbol negara, struktur pemerintahan, dan definisi demokrasi tanpa diberi ruang untuk memahami dinamika konflik kepentingan, mekanisme kontrol kekuasaan, atau praktik ketidakadilan

sosial (Salma, 2025 ; I Made Sila, 2024)). Pembelajaran cenderung memosisikan negara sebagai entitas ideal yang selalu bertindak benar, sementara praktik politik nyata diringkas menjadi narasi harmonis dan bebas dari kontroversi (Ismail et al., 2023;). Dominasi narasi seperti ini membentuk cara pandang politik yang statis dan tidak kritis.

Warisan sejarah pendidikan Indonesia turut memperkuat pola epistemologi politik yang hegemonik. Pada masa Orde Baru, sekolah digunakan sebagai instrumen ideologisasi yang menekankan kepatuhan, stabilitas, dan loyalitas terhadap negara. Residunya masih tampak dalam praktik PKn yang menempatkan guru sebagai pemegang otoritas tunggal dalam menentukan kebenaran politik (Hindun et al., 2021). Guru sering menghindari isu-isu kritis seperti konflik politik lokal, kesenjangan sosial, atau kontroversi kebijakan publik karena kekhawatiran dianggap bias atau melanggar norma profesional (Hanifa Al Izati et al., 2023)

Pengetahuan politik anak SD pun umumnya bersifat deklaratif, bukan argumentatif. Mereka mampu

menyebutkan lembaga negara dan fungsinya, tetapi belum mampu menjelaskan dinamika kekuasaan, akuntabilitas publik, atau konsep keadilan (Hindun et al., 2021). Buku teks PKn memperkuat simplifikasi tersebut dengan menampilkan negara dan pemilu secara idealistik dan menghapus ketegangan politik yang nyata (Fernando & Ismail, 2023). Epistemologi politik yang dibentuk dengan cara ini memprioritaskan kepatuhan daripada refleksi kritis.

Di sisi lain, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa anak SD sebenarnya memiliki potensi epistemik untuk memahami isu politik secara kritis apabila diberi ruang dialog, permainan peran, simulasi pemilu, diskusi isu publik, dan analisis fenomena di lingkungan sekitar (Najm Al Inu et al., 2023). Pembelajaran partisipatif dan kontekstual terbukti meningkatkan kemampuan anak membaca relasi kuasa, memahami perspektif berbeda, dan menilai klaim politik berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (Putri et al, 2025 ; Miharja et al., 2023).

Meskipun demikian, kesenjangan literatur menunjukkan

bahwa kajian mengenai epistemologi politik pada jenjang SD masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian berfokus pada pengetahuan politik, partisipasi pemilih pemula, atau efektivitas pembelajaran PKn (Abdurrahman, HeruJuabdinSada, Saiful Bahri, 2022). Belum banyak studi yang secara sistematis memetakan bagaimana epistemologi politik dikonstruksi melalui relasi pengetahuan-kekuasaan di kelas SD dan bagaimana guru memainkan peran ganda sebagai agen kebenaran sekaligus agen kekuasaan (Maslan, 2025 ; (Karolčik et al., 2025).

Dengan demikian, artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui kajian sistematis terhadap 30 artikel terbitan 2020–2025. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) merumuskan karakter epistemologi politik yang terbentuk di sekolah dasar; (2) mengidentifikasi peran guru sebagai agen kebenaran dan agen kekuasaan; dan (3) menawarkan kerangka rekonstruksi epistemologi politik yang lebih kritis, dialogis, dan emansipatoris bagi pendidikan dasar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk menelusuri, menyeleksi, dan mensintesis berbagai artikel ilmiah yang membahas epistemologi politik di sekolah dasar serta dualisme peran guru sebagai agen kebenaran dan sekaligus agen kekuasaan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran konseptual yang komprehensif, memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, menemukan kesenjangan penelitian, serta menyusun peta pengetahuan terbaru mengenai praktik pendidikan politik di sekolah dasar. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar dan jurnal nasional bereputasi dengan menggunakan kata kunci seperti “epistemologi politik”, “pendidikan politik SD”, “guru PKn”, “literasi politik”, “post-truth”, dan “pengetahuan politik anak”. Batasan waktu pencarian ditetapkan antara tahun 2020–2025 agar hasil kajian tetap relevan terhadap dinamika pendidikan kontemporer.

Pada tahap identifikasi awal,

ditemukan 84 artikel. Judul dan abstrak seluruh artikel kemudian ditelaah untuk menentukan relevansinya terhadap fokus penelitian ini. Artikel yang tidak berkaitan dengan konteks sekolah dasar, tidak membahas aspek epistemologi atau peran guru, serta artikel yang hanya mengulas pendidikan politik di jenjang SMP dan SMA dikeluarkan dari daftar. Proses penyaringan tersebut menghasilkan 38 artikel yang dibaca secara penuh. Setelah penilaian kelayakan isi, delapan artikel dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria, misalnya tidak memuat aspek epistemologis secara memadai atau tidak tersedia dalam teks lengkap. Dengan demikian, sebanyak 30 artikel dinyatakan layak dianalisis lebih lanjut sebagai sampel final.

Seluruh artikel dianalisis menggunakan teknik pengkodean yang terdiri dari koding terbuka, koding aksial, dan sintesis naratif. Pada tahap koding terbuka, berbagai potongan teks yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan politik, peran guru, relasi kuasa, literasi politik, dan praktik pembelajaran di SD ditandai

dan dikumpulkan. Pada tahap koding aksial, potongan-potongan tersebut dikelompokkan menjadi tema-tema besar seperti epistemologi politik normatif, otoritas epistemik guru, kontrol wacana di kelas, pembelajaran politik kritis, serta dinamika kurikulum dan birokrasi pendidikan. Selanjutnya, seluruh temuan dianalisis melalui sintesis naratif untuk menjelaskan hubungan antartema dalam kerangka epistemologi dan relasi pengetahuan–kekuasaan.

Validitas dan reliabilitas penelitian dijaga melalui pembacaan berulang terhadap seluruh artikel, triangulasi temuan dari berbagai konteks penelitian, serta pencatatan sistematis seluruh proses penelusuran dan analisis. Karena penelitian ini menggunakan data sekunder, temuan yang dihasilkan bersifat konseptual dan interpretatif, bukan generalisasi statistik, namun tetap memberikan landasan teoretis yang kuat bagi penelitian lanjutan maupun pengembangan praktik pendidikan politik di sekolah dasar.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kajian ini menunjukkan bahwa epistemologi politik di sekolah dasar dibentuk melalui interaksi kompleks antara kurikulum, buku teks, praktik pedagogis, relasi kuasa, serta cara guru memosisikan diri sebagai sumber kebenaran dan pengontrol wacana kelas. Temuan penelitian mengerucut pada lima tema besar, yaitu epistemologi politik yang masih normatif-deklaratif, dominasi peran guru sebagai otoritas epistemik, terbatasnya ruang dialog politik kritis, potensi kemampuan siswa untuk memahami isu sosial sederhana, dan pengaruh struktur institusional sekolah terhadap proses pembentukan pengetahuan politik. Secara umum, pembelajaran politik di SD lebih banyak berfungsi sebagai mekanisme penanaman moral dan kepatuhan, bukan sebagai proses pembentukan nalar kritis dan kesadaran demokratis siswa.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi epistemologi politik sejak usia dini tidak bersifat netral. Cara guru menyampaikan pengetahuan politik sangat menentukan bagaimana siswa memandang negara, kekuasaan, dan demokrasi. Ketika

pembelajaran diarahkan pada kepatuhan dan keseragaman, siswa berisiko tumbuh menjadi warga negara yang pasif dan tidak terbiasa mempertanyakan informasi. Pembelajaran politik yang ideal seharusnya membantu siswa memahami relasi kekuasaan, mengenali ketidakadilan, dan berlatih membuat keputusan berdasarkan argumen, bukan sekadar menerima kebenaran yang ditetapkan guru. Oleh karena itu, temuan ini penting karena memperlihatkan ketidakseimbangan antara tujuan ideal Pendidikan kewarganegaraan dengan praktik pembelajaran yang terjadi di ruang kelas.

Hasil penelitian ini konsisten dengan berbagai studi yang menunjukkan bahwa pendidikan politik di tingkat sekolah dasar lebih menekankan moralitas, stabilitas, dan hafalan struktur ketatanegaraan. Literatur terdahulu menggambarkan guru sebagai otoritas epistemik yang mengarahkan pemahaman siswa pada kebenaran tunggal yang harus diterima, bukan diperdebatkan. Kurikulum dan buku teks

memperkuat representasi politik yang harmonis dan ideal, tanpa memberikan ruang bagi pemahaman atas dinamika kekuasaan, konflik kepentingan, atau persoalan keadilan sosial. Selain itu, sejumlah penelitian menegaskan bahwa siswa sebenarnya memiliki kemampuan awal untuk memahami isu sosial melalui contoh konkret, namun kapasitas ini tidak berkembang karena dominasi pembelajaran satu arah. Dengan demikian, temuan studi ini dapat diterima karena sejalan dengan gagasan dalam pedagogi kritis bahwa struktur pendidikan sering kali mereproduksi relasi kuasa melalui cara pengetahuan disampaikan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi-studi internasional yang mengamati bagaimana pendidikan politik anak sering disederhanakan secara ekstrem untuk menghindari isu kontroversial. Guru cenderung menempatkan diri sebagai penjaga stabilitas kelas, sehingga pembelajaran politik diarahkan pada ketertiban, bukan dialog. Studi lain menunjukkan bahwa guru memegang peran sebagai *gatekeeper* pengetahuan

politik dan membatasi siswa dari diskursus politik yang dianggap “terlalu sensitif”. Namun demikian, penelitian ini menawarkan perspektif berbeda karena menggabungkan analisis epistemik, pedagogi, dan struktur institusional secara bersamaan. Hasilnya memperlihatkan bahwa dualisme peran guru sebagai agen kebenaran sekaligus agen kekuasaan merupakan fondasi dari terbentuknya epistemologi politik yang timpang di tingkat sekolah dasar.

Meskipun demikian, kondisi epistemologi politik normatif-deklaratif memiliki sejumlah penjelasan alternatif. Guru mungkin terikat oleh tekanan kurikulum dan supervisi akademik sehingga memilih strategi penyederhanaan materi demi ketuntasan. Keterbatasan kompetensi literasi politik membuat guru berhati-hati dalam mengangkat isu yang berpotensi memicu kontroversi. Budaya sekolah yang hierarkis memperkuat posisi guru sebagai otoritas yang tidak dapat dipertanyakan. Selain itu, kekhawatiran orang tua dan masyarakat terhadap pembelajaran

politik juga memengaruhi keputusan guru untuk meminimalkan diskusi sensitif di kelas. Penjelasan alternatif ini menunjukkan bahwa dualisme peran guru tidak hanya berasal dari preferensi personal, tetapi juga struktur sosial yang membingkai pekerjaan guru. Karena itu, pemahaman mengenai epistemologi politik di sekolah dasar perlu dianalisis tidak hanya melalui praktik pedagogis guru, tetapi juga melalui kerangka epistemik yang lebih luas yang membentuk bagaimana pengetahuan politik diproduksi dan diwariskan kepada siswa. Dengan memahami kerangka ini, kita dapat melihat bahwa epistemologi politik yang terbentuk di ruang kelas bukanlah sesuatu yang terjadi secara spontan, melainkan hasil interaksi antara kurikulum, norma institusional, buku teks, ekspektasi sosial, serta peran guru sebagai agen kebenaran dan agen kekuasaan.

Setelah dianalisis, epistemologi politik normatif yang berkembang di sekolah dasar merupakan hasil dari tradisi panjang pendidikan

kewarganegaraan yang menekankan harmoni, stabilitas, dan kepatuhan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa materi politik di SD dirancang untuk memperkenalkan anak pada konsep-konsep dasar negara tanpa mengajak mereka memasuki kompleksitas relasi kekuasaan (I Made Sila, 2024; Madiun, 2025). Anggapan bahwa anak belum mampu memahami konflik kepentingan atau dinamika sosial membuat pembelajaran politik lebih dipusatkan pada nilai moral dan penguatan karakter. Namun, pendekatan ini justru menciptakan epistemologi yang tidak lengkap. Anak hanya melihat negara sebagai entitas tunggal yang bekerja harmonis dan netral, bukan sebagai arena tarik-menarik kepentingan maupun ruang di mana kebijakan diproduksi melalui proses negosiasi. Representasi idealistik ini diperkuat oleh buku teks yang mengusung narasi heroik tentang pemimpin (Ismail et al., 2023) dan menggambarkan pemilu sebagai pesta demokrasi yang selalu jujur dan adil tanpa membahas risiko manipulasi atau politik uang (Utami et al., 2025).

Meskipun demikian, kondisi epistemologi politik normatif-deklaratif ini tidak terjadi secara tiba-tiba atau semata-mata karena pilihan pedagogis guru. Sejumlah penjelasan alternatif dapat dipertimbangkan. Guru mungkin terikat oleh tekanan kurikulum dan supervisi akademik sehingga memilih strategi penyederhanaan demi ketuntasan. Di sisi lain, keterbatasan kompetensi literasi politik membuat guru berhati-hati dalam mengangkat isu yang berpotensi memicu kontroversi. Budaya sekolah yang hierarkis juga memperkuat posisi guru sebagai otoritas yang sulit dipertanyakan, sementara kekhawatiran orang tua dan masyarakat terhadap pembelajaran politik turut mendorong guru untuk meminimalkan diskusi sensitif. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa konstruksi epistemologi politik anak tidak hanya dibentuk oleh interaksi di kelas, tetapi juga oleh struktur sosial yang lebih luas.

Dalam konteks tersebut, transisi menuju analisis peran guru menjadi penting. Ketika epistemologi politik yang diterima anak dibingkai dalam representasi

idealistik dan normatif, posisi guru sebagai agen utama pengetahuan semakin sentral. Guru menjadi aktor yang tidak hanya menyampaikan konsep, tetapi juga menentukan cara siswa memaknai realitas politik.

Peran guru sebagai agen kebenaran dalam pendidikan politik di sekolah dasar tidak hanya terbentuk melalui tugas formal sebagai penyampai materi, tetapi juga melalui posisi sosial dan simbolik yang mereka miliki di mata siswa. Anak usia SD cenderung memandang guru sebagai figur yang selalu benar, penuh wibawa, dan layak dipercaya, sehingga setiap informasi yang disampaikan guru diterima tanpa proses verifikasi tambahan (Mujianto et al., 2025; Herwani, 2022). Dalam konteks epistemik, guru menjadi otoritas primer yang memonopoli saluran informasi politik di kelas, baik secara sadar maupun tidak.

Otoritas epistemik ini terbentuk melalui beberapa cara. Pertama, tradisi pendidikan Indonesia menempatkan guru sebagai figur moral. Buku-buku teks, kurikulum, dan budaya sekolah mengajarkan bahwa guru adalah panutan yang

tidak boleh dibantah. Akibatnya, siswa SD tidak memiliki keberanian epistemik untuk mempertanyakan narasi yang disampaikan guru, meskipun mereka mungkin menemukan ketidaksesuaian antara apa yang diajarkan dan realitas sosial di lingkungan mereka. Guru tidak hanya menjelaskan konsep negara, demokrasi, atau pemilu, tetapi juga menentukan cara terbaik bagi anak untuk memaknainya. Interpretasi guru menjadi kacamata tunggal yang membingkai pemahaman politik siswa (Aeni et al., 2022).

Kedua, guru menyaring pengetahuan politik secara selektif. Banyak guru memilih untuk tidak menyampaikan isu-isu sensitif seperti konflik pemilu, perdebatan kebijakan publik, atau kasus korupsi karena khawatir dianggap berpihak atau tidak profesional (Febryant, 2023). Kekhawatiran ini muncul karena tekanan dari kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat yang sering menganggap bahwa politik adalah hal yang tabu untuk dibicarakan di depan anak-anak. Dalam sejumlah studi, guru mengaku menghindari pembahasan isu politik aktual untuk

menjaga “keamanan kelas” dan menghindari potensi konflik (Rosa & Meireri, 2024). Padahal, penghindaran terhadap isu-isu tersebut berarti menutup kesempatan bagi anak untuk memahami dinamika politik sebagai proses negosiasi dan dialektika kepentingan.

Ketiga, kecenderungan guru untuk menyederhanakan materi politik juga memperkuat posisi mereka sebagai agen kebenaran. Dengan alasan agar siswa mudah memahami materi, guru sering memberikan narasi hitam-putih: pemimpin harus baik, negara harus adil, warga negara harus patuh. Penyederhanaan ini sering menghapus dimensi kritis yang sebenarnya penting dalam membangun literasi politik (Maslan, 2025). Alih-alih melihat politik sebagai ruang perdebatan dan negosiasi, anak justru belajar bahwa politik adalah kumpulan aturan moral yang tidak perlu dipertanyakan.

Selain itu, posisi guru sebagai agen kebenaran semakin menguat ketika mempertimbangkan rendahnya literasi digital siswa. Anak SD belum memiliki

keterampilan untuk menilai kredibilitas sumber informasi yang mereka temui di internet atau media sosial. Mereka belum mampu membedakan fakta, opini, dan hoaks, sehingga apa pun yang disampaikan guru menjadi landasan epistemik utama yang mereka gunakan untuk memahami wacana politik (Karolčík et al., 2025). Dalam kondisi seperti ini, guru memiliki kekuasaan epistemologis yang sangat besar, mereka bukan hanya membentuk pengetahuan anak, tetapi juga mengarahkan cara anak memilah dan menilai informasi baru (Sihotang & Mustika, 2024).

Fenomena ini dapat dipahami dalam kerangka teori Foucault mengenai hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan; mereka menentukan apa yang dapat dianggap sebagai pengetahuan. Mereka menentukan batas antara “isu yang boleh dibicarakan” dan “isu yang tabu”. Ketika guru mengarahkan pembelajaran hanya pada aspek-aspek normatif, mereka secara tidak langsung meneguhkan struktur kekuasaan yang

menguntungkan narasi dominan dan menyingkirkan realitas politik yang lebih kompleks. Dengan kata lain, guru melakukan praktik *gatekeeping epistemik*, yaitu membatasi akses siswa terhadap ragam pengetahuan politik yang lebih kaya.

Praktik semacam ini memiliki implikasi jangka panjang. Siswa yang terbiasa menerima pengetahuan dari figur otoritatif tanpa proses verifikasi cenderung mengembangkan gaya berpikir yang bergantung pada otoritas eksternal. Dalam demokrasi, kondisi ini dapat melemahkan kapasitas warga negara untuk bersikap kritis terhadap kebijakan publik atau tindakan pemerintah. Anak yang tidak terbiasa mempertanyakan otoritas sejak dini cenderung pasif dan mudah dipengaruhi oleh wacana populis atau disinformasi.

Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketika guru membuka ruang dialog dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengemukakan pendapat, posisi guru sebagai agen kebenaran dapat bergeser menjadi agen refleksi. Guru dapat

memfasilitasi diskusi tentang perbedaan pendapat, memperkenalkan berbagai perspektif, atau membantu siswa memahami bahwa politik bukan hanya tentang kebenaran tunggal, tetapi tentang proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak argumen (Putri et al., 2025). Meskipun praktik ini masih jarang ditemukan karena keterbatasan kurikulum, waktu belajar, dan kapasitas guru, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa peran guru bersifat dinamis dan dapat ditransformasikan.

Dengan demikian, peran guru sebagai agen kebenaran bersifat ambivalen. Di satu sisi, mereka merupakan aktor yang sangat penting dalam membentuk dasar literasi politik anak. Di sisi lain, mereka juga berpotensi menjadi penghambat perkembangan pemikiran kritis apabila praktik pengajaran tetap berada dalam kerangka normatif dan otoritatif. Transformasi pendidikan politik di SD membutuhkan kesadaran guru bahwa mereka tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi sedang membentuk cara anak memahami dunia.

Namun, praktik semacam ini masih jarang ditemukan karena keterbatasan kurikulum, waktu belajar, dan kapasitas guru itu sendiri. Dengan demikian, peran guru sebagai agen kebenaran bersifat ambivalen. Di satu sisi, mereka merupakan aktor yang sangat penting dalam membentuk dasar literasi politik anak. Di sisi lain, mereka juga berpotensi menjadi penghambat perkembangan pemikiran kritis apabila praktik pengajaran tetap berada dalam kerangka normatif dan otoritatif.

Transformasi pendidikan politik di SD membutuhkan kesadaran guru bahwa mereka tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi sedang membentuk cara anak memahami dunia. Kesadaran inilah yang membuka jalan untuk memahami posisi ganda guru tidak hanya sebagai agen kebenaran, tetapi juga sebagai bagian dari struktur kekuasaan di sekolah yang mengendalikan produksi pengetahuan politik sejak dini. Dalam konteks ini, peran guru sebagai agen kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan institusional yang membentuk dinamika kelas.

Dalam perspektif Foucault, kekuasaan bukan hanya dimaknai sebagai tindakan represif, tetapi juga sebagai mekanisme produktif yang membentuk cara berpikir, bertindak, dan memahami realitas. Dalam konteks pembelajaran politik di SD, guru memiliki kuasa untuk menentukan batas wacana apa yang dapat dibicarakan, siapa yang boleh berbicara, dan bagaimana sebuah fenomena harus dipahami. Guru tidak sekadar menyampaikan materi; mereka membentuk horizon pengetahuan yang dapat diakses oleh siswa. Di ruang kelas, kontrol wacana guru sering kali berlangsung secara halus dan tidak disadari. Misalnya, guru menentukan kapan siswa boleh bertanya, jenis pertanyaan apa yang dianggap “tepat”, serta bagaimana jawaban siswa harus dibingkai. Ketika siswa mengajukan pertanyaan yang dianggap terlalu kritis atau sensitif, guru sering kali merespons dengan mengalihkan pembahasan atau memberikan jawaban normatif (Najm Al Inu et al., 2023). Praktik ini secara tidak langsung membatasi ruang dialektis dalam kelas dan memperkuat posisi guru sebagai penentu

tunggal legitimasi sebuah pengetahuan.

Birokrasi sekolah semakin memperkuat posisi guru sebagai agen kekuasaan. Guru bekerja dalam struktur yang menuntut kepatuhan terhadap kurikulum, supervisi, dan standar administratif tertentu. Tekanan ini membuat guru sering memilih jalan aman dalam mengajarkan isu politik, yaitu dengan berpegang pada materi formal tanpa membuka ruang eksplorasi kritis (Hwani, 2022). Budaya sekolah yang menekankan harmoni juga menempatkan guru dalam posisi di mana mereka harus menghindari konflik atau perdebatan yang dapat mengganggu stabilitas kelas. Dalam kultur seperti ini, guru berpotensi secara tidak sadar mensterilkan wacana politik dari aspek-aspek kritis yang penting bagi perkembangan literasi politik anak (Miharja et al., 2023). Kekuasaan guru juga dapat dilihat melalui praktik pedagogis sehari-hari. Ketika guru mengoreksi pendapat siswa secara langsung tanpa memberi kesempatan pada siswa untuk menjelaskan argumennya, siswa belajar bahwa

pendapat mereka tidak memiliki nilai epistemik yang setara dengan guru. Jika guru menuntut kepatuhan ketimbang partisipasi, siswa secara bertahap memahami bahwa politik adalah ruang dengan satu suara dominan yang tidak boleh dilawan (Aeni et al., 2022). Pembentukan persepsi ini berpotensi mengakar hingga dewasa, menghasilkan warga negara yang pasif, patuh, dan kurang terbiasa mempertanyakan kebijakan publik atau keputusan otoritas.

Selain itu, bahasa kekuasaan yang direproduksi guru dalam interaksi verbal memperkuat struktur hierarkis kelas. Pilihan kata, intonasi, dan ekspresi guru dapat menciptakan suasana di mana siswa merasa harus menerima informasi tanpa refleksi. Mujiyanto et al. (2025) menunjukkan bahwa kontrol interaksi verbal seperti memutus pembicaraan siswa, menolak pendapat tanpa alasan, atau membatasi penggunaan istilah tertentu menciptakan relasi kuasa yang mengatur siapa yang berhak mendefinisikan kebenaran dalam kelas. Anak belajar bahwa suara tertentu (guru) lebih “valid” dibanding suara lainnya, sebuah

pola yang mencerminkan relasi kuasa dalam masyarakat luas. Sementara itu, mekanisme kontrol lainnya datang dari cara guru menyusun aktivitas pembelajaran. Aktivitas seperti ceramah satu arah, penghafalan, dan tugas tertulis yang menekankan jawaban tunggal membangun struktur kognitif yang menempatkan siswa sebagai penerima pasif pengetahuan. Sebaliknya, kegiatan seperti diskusi terbuka, debat kelas, studi kasus sosial, atau analisis realitas sehari-hari sering kali jarang dilakukan karena dianggap memakan waktu, sulit dikontrol, atau berpotensi menimbulkan ketegangan (Maslan, 2025). Pemilihan metode ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga ideologis: guru secara tidak sadar sedang menentukan jenis warga negara seperti apa yang ingin diciptakan oleh sistem pendidikan.

Pada tingkat makro, relasi kuasa guru juga dipengaruhi oleh kebijakan negara yang menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai alat pembentukan identitas nasional. Dalam sejarah pendidikan Indonesia, pendidikan kewarganegaraan pernah

digunakan sebagai instrumen legitimasi politik rezim tertentu. Akibatnya, guru diajarkan untuk menekankan aspek loyalitas, kepatuhan, dan nasionalisme yang kadang tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah. Meski konteks politik sudah berubah, paradigma lama ini masih tersisa dalam praktik pedagogis guru, menciptakan epistemologi politik yang mengutamakan stabilitas ketimbang dinamika kritis. Implikasinya jelas: siswa belajar melihat politik bukan sebagai ruang diskusi dan argumentasi, tetapi sebagai sesuatu yang sudah ditentukan dari atas. Ketika anak menghadapi situasi ketidakadilan, korupsi, atau perbedaan pandangan di masyarakat, mereka tidak memiliki perangkat kognitif untuk memahami atau merespons secara kritis. Dengan kata lain, guru sebagai agen kekuasaan memiliki peran besar dalam membentuk pola pikir politik generasi muda.

Namun demikian, guru juga memiliki potensi transformatif. Ketika guru memanfaatkan otoritasnya secara reflektif, ia dapat mengalihkan kekuasaan tersebut menjadi kekuatan emansipatoris

yang membuka ruang pemikiran siswa. Guru dapat mendorong siswa untuk bertanya, menilai argumen, dan memahami bahwa politik bukanlah ruang kebenaran tunggal, tetapi arena dialog dan negosiasi. Dalam kondisi semacam ini, guru bukan hanya agen kekuasaan, tetapi juga agen pembebasan yang mampu menumbuhkan literasi politik kritis sejak dini dan menyiapkan generasi yang lebih demokratis.

Dalam kondisi semacam ini, guru bukan hanya agen kekuasaan, tetapi juga agen pembebasan yang mampu menumbuhkan literasi politik kritis sejak dini dan menyiapkan generasi yang lebih demokratis. Potensi transformatif ini penting untuk digarisbawahi karena menunjukkan bahwa meskipun struktur sosial dan birokrasi pendidikan sering kali membatasi ruang dialog, pintu perubahan tetap terbuka ketika guru menyadari peran strategis mereka dalam membentuk kesadaran politik anak. Dari titik inilah peluang pengembangan literasi politik kritis dapat mulai dipahami dan dieksplorasi lebih jauh di lingkungan sekolah dasar.

Meskipun epistemologi politik di sekolah dasar masih didominasi oleh pendekatan normatif dan deklaratif, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa potensi pengembangan literasi politik kritis pada siswa tetap sangat terbuka. Hal ini karena anak usia SD tidak sepenuhnya pasif dalam memahami dunia sosial; mereka memiliki rasa ingin tahu, kemampuan observasi, serta kapasitas interpretasi sederhana yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran yang tepat. Dengan demikian, meski struktur pendidikan formal sering membatasi ruang dialog, terdapat peluang transformasi pedagogis untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan analitis sejak dini. Terdapat beberapa jalur strategis yang dapat dimanfaatkan guru untuk membangun literasi politik kritis pada anak, antara lain melalui dialog, analisis isu, pengalaman kontekstual, media digital, serta penciptaan ruang aman epistemik.

a. Pembelajaran Dialogis untuk Membangun Keberanian Berpendapat Dialog merupakan komponen fundamental dalam pendidikan politik yang

emansipatoris. Melalui dialog, guru membuka kesempatan bagi siswa untuk berbicara, mengemukakan pendapat, bertanya, serta memproses gagasan yang berbeda. Rosa & Meireri (2024) menegaskan bahwa pembelajaran dialogis menciptakan ruang aman di mana anak dapat menguji ide-ide mereka tanpa takut disalahkan. Dalam konteks ini, kelas berubah dari ruang penyampaian materi menjadi ruang produksi makna bersama. Anak yang dilibatkan dalam diskusi mengenai isu-isu sederhana, misalnya tentang pembagian tugas kelas, pemilihan ketua kelas, atau aturan bermain, dapat memahami konsep keadilan, hak, dan tanggung jawab secara lebih konkret. Ketika siswa melihat bahwa pandangan mereka dihargai, mereka mengembangkan keberanian epistemik (*epistemic courage*), yakni keberanian untuk bersuara dan mempertanyakan sesuatu. Keterampilan ini merupakan fondasi literasi politik kritis yang sangat penting untuk

menghadapi dinamika demokrasi di masa depan.

- b. Analisis Isu dan Pemecahan Masalah sebagai Latihan Berpikir Politik Pembelajaran yang mengajak siswa menganalisis isu sosial di sekitar mereka dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat literasi politik kritis. Guru dapat memantik analisis melalui pertanyaan seperti: “Mengapa aturan ini dibuat?”, “Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan?”, “Apakah keputusan ini adil untuk semua?”. Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, siswa belajar bahwa isu politik tidak netral, tetapi berkaitan dengan kepentingan dan nilai tertentu. Pendekatan berbasis masalah (*problem-based learning*) mendorong siswa untuk mengevaluasi berbagai alternatif solusi dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok yang berbeda (Sulistiawati & Prastowo, 2021). Dalam proses tersebut, mereka belajar menyusun argumen, memberi alasan, dan mengevaluasi keputusan secara logis. Latihan semacam ini tidak hanya memperkenalkan siswa pada

praktik berpikir kritis, tetapi juga menanamkan nilai demokratis seperti musyawarah, kompromi, dan empati. Dengan demikian, pendidikan politik tidak hanya membahas konsep negara, melainkan mengembangkan cara berpikir yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat demokratis.

- c. **Pengalaman Kontekstual** sebagai Jembatan antara Teori dan Realitas Politik Literasi politik tidak dapat berkembang hanya melalui pembelajaran tertulis. Anak perlu diberi pengalaman nyata yang memungkinkan mereka melihat bagaimana proses politik berlangsung di dunia sosial. Beberapa contoh aktivitas yang terbukti efektif ialah simulasi pemilu ketua kelas, pembuatan aturan kelas secara demokratis, observasi lingkungan sosial, kunjungan ke kantor desa atau ruang publik, serta permainan peran yang menggambarkan konflik sosial. Penelitian Putri et al. (2025) menunjukkan bahwa pengalaman konkret membantu anak memahami bahwa kekuasaan dapat digunakan

secara adil maupun tidak adil. Ketika siswa dapat mengidentifikasi ketidaksetaraan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika seorang teman selalu mendominasi permainan, mereka belajar memahami dinamika kekuasaan dengan lebih realistis. Miharja et al. (2023) menambahkan bahwa pengalaman langsung semacam ini memperkuat pemahaman anak tentang tanggung jawab, kewenangan, dan dampak keputusan terhadap kehidupan bersama.

- d. **Media Digital sebagai Ruang Belajar Politik yang Relevan dan Kreatif** Di era digital, akses anak terhadap informasi politik menjadi semakin luas. Oleh karena itu, guru dapat memanfaatkan teknologi untuk memperkaya pembelajaran politik, misalnya melalui video edukatif tentang demokrasi, analisis konten berita ramah anak, permainan digital bertema kepemimpinan, atau proyek kelas menggunakan media sosial sekolah. Aeni et al. (2022) menunjukkan bahwa media digital dapat menjadi alat

yang efektif untuk menstimulasi rasa ingin tahu politik anak. Guru dapat memanfaatkan video animasi untuk menjelaskan konsep pemilu atau struktur pemerintahan dengan cara yang menarik. Namun, penggunaan digital memerlukan bimbingan literasi informasi agar siswa tidak salah menafsirkan atau menyerap konten bias yang beredar online. Dengan dukungan guru, pengalaman digital dapat menjadi pintu masuk bagi literasi politik yang lebih kritis.

- e. Peran Guru dalam Menciptakan Ruang Aman Epistemik Guru yang menyediakan ruang aman bagi siswa untuk menyampaikan pendapat, bertanya, atau bahkan berbeda pendapat memainkan peran penting dalam membentuk epistemologi politik yang dialogis. Mahfuzah et al. (2025) menegaskan bahwa validasi pendapat siswa, seperti mengapresiasi argumentasi, memberi kesempatan berbicara, dan tidak langsung menyalahkan, mampu meningkatkan kepercayaan diri

siswa dalam memahami isu politik.

Lingkungan pembelajaran yang responsif mendorong anak untuk memahami bahwa pendapat mereka memiliki nilai epistemik. Melalui cara ini, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber kebenaran, tetapi fasilitator pengetahuan yang membantu siswa belajar membangun pemahaman berdasarkan bukti dan argumentasi. Guru dapat mengarahkan siswa untuk mempertanyakan asumsi, memeriksa informasi, dan melihat isu politik dari berbagai sisi. Transformasi peran guru ini penting untuk menghindari epistemologi monolitik yang hanya bersumber dari otoritas.

- f. Literasi Politik Kritis sebagai Fondasi Demokrasi Masa Depan Dalam konteks sosial-politik yang semakin kompleks, kemampuan untuk membaca informasi politik secara kritis menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap warga negara. Karolčík et al. (2025) menekankan bahwa literasi politik kritis sejak dini merupakan strategi penting untuk

menghadapi era post-truth yang sarat polarisasi, hoaks, dan manipulasi informasi. Anak yang terbiasa mempertanyakan, menganalisis, dan memvalidasi informasi akan lebih siap menjadi warga negara reflektif yang mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, pengembangan literasi politik kritis pada siswa SD bukan sekadar pilihan pedagogis, tetapi kebutuhan demokratis. Pendidikan politik yang menekankan dialog, refleksi, dan pengalaman nyata dapat membentuk generasi yang tidak hanya memahami hak dan kewajiban, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan keberanian untuk memperjuangkan keadilan sosial.

Mengintegrasikan literasi politik kritis dalam dinamika kurikulum SD akan membantu mengurangi kesenjangan epistemologis antara dunia nyata siswa yang penuh dengan isu sosial-politik dan pengalaman belajar mereka yang terbatas oleh aturan institusional. Ketika siswa diajak

membaca peristiwa politik sederhana di lingkungan sekitar, misalnya aturan ketertiban sekolah, pemilihan ketua kelas, atau isu keadilan dalam pembagian tugas kelompok, mereka mulai memahami bahwa politik bukan sekadar urusan negara, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Proses ini membuka ruang bagi anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir reflektif, sekaligus membantu guru memosisikan diri bukan hanya sebagai penyampai kebenaran, tetapi sebagai fasilitator dialog tentang makna keadilan, tanggung jawab, dan kekuasaan.

Namun, upaya ini tentu memerlukan dukungan kurikulum dan kelembagaan. Kurikulum nasional perlu memberi ruang yang lebih besar bagi pembelajaran berbasis dialog dan pemecahan masalah, bukan sekadar hafalan konsep. Demikian pula, buku teks perlu disusun dengan perspektif yang lebih plural, menghadirkan kasus-kasus nyata yang mengajak siswa melihat politik sebagai proses yang penuh dinamika, bukan fenomena ideal tanpa konflik. Di sisi lain, struktur kelembagaan sekolah

perlu memfasilitasi budaya diskusi, keberanian bertanya, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Tanpa perubahan pada tiga lapis struktur tersebut kurikulum, bahan ajar, dan budaya institusi sebagai upaya mendorong literasi politik kritis di SD akan sulit memperoleh pijakan yang kuat.

Dengan kata lain, integrasi literasi politik kritis bukan hanya solusi pedagogis, tetapi juga strategi struktural untuk mentransformasi bagaimana sekolah membentuk cara pandang anak terhadap kekuasaan. Dalam jangka panjang, pendekatan ini dapat membantu menggeser epistemologi politik yang selama ini bersifat top-down menuju paradigma yang lebih dialogis, humanis, dan demokratis. Anak tidak lagi hanya belajar “apa yang harus diyakini”, tetapi juga “bagaimana memahami dan menafsirkan dunia politik secara mandiri”. Transformasi inilah yang pada akhirnya menjadi prasyarat bagi terbentuknya warga negara yang mampu berpartisipasi secara kritis dalam masyarakat demokratis.

Sejalan dengan itu, penelitian-

penelitian terbaru menegaskan bahwa anak SD tidak dapat dipandang hanya sebagai objek penerima pengetahuan, melainkan sebagai subjek epistemik yang memiliki kemampuan awal untuk memahami fenomena sosial-politik di sekitar mereka. Berbagai studi menunjukkan bahwa anak-anak mampu mengenali ketidakadilan, melihat pola perlakuan tidak setara, serta menafsirkan tindakan otoritas berdasarkan pengalaman langsung (Madiun, 2025; Rosa & Meireri, 2024). Respons mereka terhadap situasi sehari-hari seperti pembagian tugas kelas yang tidak merata atau keputusan sepihak dari ketua kelas menunjukkan bahwa anak memiliki kepekaan terhadap isu keadilan, kepemimpinan, dan relasi sosial. Dengan kata lain, kapasitas epistemik ini sudah hadir sejak dini dan berkembang melalui interaksi sosial.

Namun, potensi tersebut tetap berada dalam batas-batas perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar. Penelitian mengungkapkan bahwa anak sering kali menyederhanakan fenomena politik atau menarik generalisasi berdasarkan

pengalaman personal, sehingga bimbingan epistemik dari guru menjadi sangat penting (Sihotang & Mustika, 2024; Karolčík et al., 2025). Guru perlu menyediakan stimulus berupa pertanyaan terbuka, contoh konkret, serta pengalaman belajar yang membantu anak menafsirkan isu politik dengan lebih akurat. Tanpa pendampingan yang memadai, anak berisiko membangun pemahaman keliru, terutama ketika mereka mengakses informasi digital yang sering tidak terverifikasi (Ismail et al., 2023; Kholis & Aniati, 2022). Dalam konteks ini, literasi politik kritis bukan hanya bekal bagi masa depan, tetapi juga perlindungan epistemik di era banjir informasi.

Dinamika relasi kuasa di kelas juga memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana anak dapat berfungsi sebagai subjek epistemik. Ketika interaksi guru–siswa bersifat hierarkis dan ruang dialog dibatasi, anak cenderung menahan pandangan, tidak merasa aman untuk bertanya, dan akhirnya tidak mengembangkan kemampuan interpretatif yang lebih tinggi (Mujiyanto et al., 2025; Najwah

Addina & Hanif, 2024). Sebaliknya, ketika guru membuka diskusi dua arah, menghargai pendapat anak, dan memberikan validasi terhadap proses berpikir mereka, anak menunjukkan kemampuan untuk menilai informasi, memahami perbedaan perspektif, dan merumuskan argumen dengan lebih matang. Temuan ini menegaskan bahwa cara guru mengelola wacana kelas memiliki implikasi langsung terhadap perkembangan epistemik anak.

Oleh karena itu, pendidikan politik di sekolah dasar perlu bergeser dari pendekatan yang memosisikan anak sebagai penerima pasif menuju pendekatan yang menempatkan mereka sebagai aktor penafsir dan pembangun makna. Anak perlu diberi ruang untuk mengajukan pertanyaan, mempertanyakan asumsi, dan mengkritisi fenomena sosial-politik melalui pengalaman belajar yang dialogis, partisipatif, dan kontekstual. Ketika ruang tersebut dibuka secara konsisten, pendidikan politik sejak dini tidak hanya menghasilkan pengetahuan deklaratif, tetapi juga membentuk kapasitas epistemik yang menjadi

fondasi literasi politik kritis di masa depan. Dengan kata lain, perubahan orientasi pedagogis ini merupakan langkah strategis dalam mentransformasi cara sekolah memahami dan membentuk pandangan anak mengenai relasi kuasa. Di sinilah pendidikan politik berpotensi menjadi bukan sekadar medium transmisi nilai, tetapi arena emansipasi di mana anak belajar membangun pemahaman politik secara mandiri.

Upaya rekonstruksi tersebut mengarah pada kebutuhan mendesak untuk menata ulang epistemologi politik yang selama ini dominan di ruang kelas. Berbagai kajian menegaskan bahwa pendidikan politik yang bersifat normatif dan top-down justru menghambat tumbuhnya kesadaran kritis siswa (Azhar, 2015; Maslan, 2025). Untuk mengatasi dominasi epistemik ini, banyak penelitian merekomendasikan penerapan pendekatan pendidikan politik berbasis emansipasi yang menempatkan dialog, refleksi kritis, dan keberanian mempertanyakan relasi kuasa sebagai inti proses belajar. Dalam paradigma ini, guru tidak lagi berperan sebagai satu-

satunya pemilik kebenaran, tetapi sebagai fasilitator epistemik yang membuka ruang bagi siswa untuk mengajukan argumen, mengevaluasi klaim, dan menimbang berbagai perspektif politik secara lebih mandiri.

Model pembelajaran yang mendukung rekonstruksi epistemologi politik ini telah banyak ditawarkan dalam literatur. Pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning) dapat digunakan untuk mengajak siswa memecahkan persoalan sosial di lingkungan terdekat mereka. Pembelajaran partisipatif memungkinkan anak menyumbangkan gagasan dalam diskusi kelas, sementara simulasi pemilu, sidang kelas, atau debat mini melatih keterampilan deliberasi dan negosiasi (Putri et al., 2024; Sihotang & Mustika, 2024). Selain itu, analisis wacana media dapat membantu siswa membaca bias informasi, sedangkan studi kasus lokal mengenai konflik sosial atau isu publik memberi kesempatan bagi siswa memahami dinamika kekuasaan dalam konteks nyata. Melalui berbagai pendekatan tersebut, anak tidak hanya diajak

mengenal konsep politik, tetapi belajar menggunakannya untuk menilai situasi sosial secara kritis.

Namun rekonstruksi epistemologi politik tidak dapat berjalan tanpa memperkuat kapasitas guru. Penelitian menunjukkan bahwa guru menjadi aktor kunci yang menentukan apakah pendidikan politik di kelas bersifat emansipatoris atau justru reproduktif (Herwani, 2022; Dakhi, 2023; Rosa & Meireri, 2024). Guru membutuhkan pelatihan literasi politik, literasi digital, serta metodologi pedagogis kritis agar mampu memfasilitasi dialog yang sehat tentang isu-isu politik. Rendahnya literasi politik guru sering menjadi penghambat karena guru cenderung menghindari isu aktual, membatasi dialog, atau menyederhanakan fenomena politik yang kompleks. Akibatnya, siswa tidak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis mengenai dinamika kekuasaan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Selain faktor guru, rekonstruksi epistemologi politik memerlukan perubahan pada

kurikulum, bahan ajar, dan budaya sekolah. Kurikulum perlu memberi ruang bagi pembahasan isu-isu kontemporer yang relevan bagi kehidupan anak, seperti keadilan sosial, perbedaan pendapat, dan partisipasi warga. Buku teks perlu ditulis dengan memasukkan perspektif multipel yang mencerminkan realitas sosial-politik secara lebih jujur dan tidak hanya menonjolkan narasi harmonis tentang negara (Ismail et al., 2023; Ichwani et al., 2025). Sementara itu, budaya sekolah perlu bergerak dari budaya kepatuhan menuju budaya partisipasi, di mana suara siswa dihargai, keberagaman pendapat diterima, dan proses deliberasi menjadi bagian dari kehidupan sekolah (Mujiyanto et al., 2025; Putri et al., 2025). Ketika lingkungan sekolah mendukung dialog, anak belajar membangun pandangan politik yang lebih reflektif dan kritis.

Secara keseluruhan, transformasi epistemologi politik di sekolah dasar membutuhkan perubahan sistemik yang mengintegrasikan pedagogi kritis, peningkatan kapasitas guru, pembaruan bahan ajar, dan penciptaan budaya sekolah yang

demokratis. Integrasi literasi politik kritis dengan pendekatan emansipatoris memungkinkan anak memahami politik bukan sebagai sesuatu yang jauh dan abstrak, melainkan sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Dengan dukungan lingkungan belajar yang tepat, anak dapat tumbuh menjadi warga negara yang sadar, reflektif, dan mampu berpartisipasi secara kritis dalam dinamika demokrasi kontemporer.

Temuan-temuan tersebut memberikan implikasi penting bagi pengembangan pendidikan politik di sekolah dasar. Pertama, penelitian ini menegaskan bahwa relasi epistemik antara guru dan siswa perlu diredefinisi agar tidak lagi terjebak dalam pola hierarkis yang menempatkan guru sebagai otoritas tunggal dalam penentuan kebenaran. Ketika guru direposisi sebagai fasilitator epistemik, siswa berpeluang lebih besar untuk mengembangkan kemampuan menafsirkan fenomena sosial-politik secara mandiri dan kritis. Implikasi ini menuntut adanya perubahan paradigma dalam pelatihan guru, terutama terkait penguatan literasi politik, literasi

digital, dan kompetensi pedagogis kritis yang memungkinkan guru mengelola dialog serta keragaman perspektif di ruang kelas.

Kedua, penelitian ini menunjukkan perlunya reformulasi kurikulum agar pendidikan politik tidak hanya terpusat pada materi normatif mengenai negara, aturan, dan kewajiban warga negara, tetapi juga mencakup pengalaman belajar yang memungkinkan siswa membaca realitas politik dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum yang lebih dialogis, kontekstual, dan berorientasi pada pemecahan masalah akan memberi ruang bagi anak untuk mengembangkan kapasitas reflektif dan kritis sejak dini. Reformulasi ini membutuhkan kolaborasi antara perancang kurikulum, akademisi, dan praktisi pendidikan agar materi yang disusun benar-benar mendorong lahirnya warga negara yang literat secara politik.

Ketiga, temuan mengenai keterbatasan kapasitas guru dalam memfasilitasi dialog politik mengindikasikan perlunya intervensi kelembagaan yang lebih serius. Sekolah perlu mengembangkan budaya akademik

yang mendukung percakapan terbuka, keberanian mengajukan pertanyaan, serta penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Budaya sekolah yang demokratis menjadi prasyarat penting bagi tumbuhnya literasi politik kritis, sehingga program penguatan budaya sekolah harus menjadi agenda prioritas dalam kebijakan pendidikan politik di tingkat dasar. Hal ini juga berarti bahwa kepala sekolah dan pemangku kebijakan perlu diberi pemahaman mengenai pentingnya ruang deliberatif bagi pengembangan kapasitas epistemik siswa.

Keempat, implikasi yang tak kalah penting adalah kebutuhan untuk memperbarui bahan ajar dan buku teks sehingga tidak hanya menampilkan narasi tunggal mengenai negara dan kekuasaan. Bahan ajar perlu dirancang dengan perspektif multipel dan mengangkat studi kasus autentik yang relevan dengan kehidupan anak. Langkah ini dapat membantu siswa melihat bahwa politik bukan hanya konsep abstrak, tetapi berkaitan erat dengan pengalaman mereka sehari-hari, seperti pengambilan keputusan, ketidakadilan, atau perbedaan

pendapat. Pembaruan bahan ajar yang berorientasi pada multiperspektif juga dapat mengurangi risiko indoktrinasi dan menumbuhkan kemampuan anak menilai klaim berdasarkan argumentasi, bukan otoritas.

Kelima, penelitian ini memiliki implikasi bagi pengembangan kebijakan pendidikan jangka panjang. Jika pendidikan politik ingin menghasilkan warga negara yang kritis dan demokratik, maka kebijakan nasional perlu mengintegrasikan literasi politik kritis sebagai bagian dari tujuan pendidikan dasar. Kebijakan yang hanya menekankan pada kedisiplinan, kepatuhan, atau moralitas normatif tanpa memberikan ruang bagi kemampuan berpikir kritis akan sulit menghasilkan generasi yang mampu merespons tantangan demokrasi kontemporer. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus bergerak dari pendekatan indoktrinatif menuju pendekatan emansipatoris yang mengakui anak sebagai subjek epistemik.

Secara keseluruhan, implikasi penelitian ini mengarah pada kebutuhan untuk melakukan rekonstruksi sistemik terhadap

praktik pendidikan politik di sekolah dasar. Perubahan tidak hanya harus terjadi pada level pedagogi, tetapi juga pada struktur kurikulum, literasi guru, bahan ajar, dan budaya sekolah. Dengan mengintegrasikan pendekatan emansipatoris dan literasi kritis secara konsisten, sekolah dapat menjadi ruang yang memungkinkan anak membangun pemahaman politik yang otonom, reflektif, dan berdaya.

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai rekonstruksi epistemologi politik dan pengembangan literasi politik kritis pada siswa sekolah dasar, terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu diakui sebagai bagian dari keutuhan kajian akademik. Pertama, penelitian ini sangat bergantung pada analisis literatur dan temuan empiris dari berbagai konteks pendidikan yang tidak seluruhnya merepresentasikan kondisi sosial, budaya, dan politik di setiap sekolah dasar di Indonesia. Perbedaan karakteristik lingkungan belajar, latar belakang siswa, serta dinamika budaya sekolah dapat memengaruhi sejauh mana rekomendasi dalam penelitian ini

dapat diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, generalisasi temuan harus dilakukan secara hati-hati, terutama ketika diterapkan pada konteks yang memiliki struktur sosial berbeda atau menghadapi tantangan pendidikan yang lebih kompleks.

Keterbatasan berikutnya terletak pada kurangnya data longitudinal yang dapat menggambarkan bagaimana kemampuan epistemik dan literasi politik kritis anak berkembang dari waktu ke waktu. Sebagian besar studi yang dianalisis merupakan penelitian potong lintang (cross-sectional) sehingga belum mampu menjelaskan perkembangan epistemologi politik anak dalam jangka panjang atau perubahan yang terjadi setelah intervensi pedagogis tertentu. Akibatnya, pemahaman mengenai dampak kumulatif pembelajaran dialogis dan pedagogi emansipatoris terhadap perkembangan literasi politik anak masih memerlukan penelitian lanjutan yang lebih sistematis dan berjangka panjang.

Selain itu, penelitian ini juga menghadapi keterbatasan terkait

ketersediaan literatur yang secara khusus membahas pendidikan politik kritis pada level sekolah dasar, terutama dalam konteks Indonesia. Sebagian besar literatur yang ada masih berfokus pada pendidikan menengah, isu demokrasi secara umum, atau kajian teoretis mengenai pedagogi kritis. Kekurangan literatur empiris yang secara langsung mengkaji praktik pembelajaran politik di kelas awal menyebabkan analisis dalam penelitian ini harus mengandalkan interpretasi teoretis dan perbandingan dengan konteks internasional. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian mendatang untuk merancang studi yang lebih berorientasi pada praktik nyata di ruang kelas.

Keterbatasan lainnya terletak pada aspek metodologis, di mana berbagai penelitian yang dirujuk memiliki perbedaan kerangka teori, instrumen pengukuran, dan pendekatan analisis. Variasi metodologis ini memunculkan tantangan dalam melakukan sintesis temuan secara komprehensif. Beberapa penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada interpretasi

pengalaman anak dan guru, sementara yang lain menggunakan pendekatan kuantitatif yang menilai kemampuan literasi politik berdasarkan indikator tertentu. Keragaman pendekatan ini membuat konsistensi temuan menjadi sulit diukur secara seragam, meskipun tetap memberikan gambaran umum mengenai pentingnya pendekatan kritis dalam pendidikan politik.

Di samping itu, penelitian ini belum secara mendalam membahas faktor eksternal di luar sekolah yang mungkin memengaruhi kemampuan anak dalam mengembangkan literasi politik kritis. Lingkungan digital, budaya keluarga, dan pengaruh media menjadi variabel yang sangat signifikan dalam pembentukan pengetahuan politik anak, namun keterkaitannya belum sepenuhnya dieksplorasi. Minimnya kajian empiris yang mengintegrasikan variabel sekolah dan nonsekolah menjadi celah yang dapat dimaksimalkan dalam penelitian berikutnya agar pemahaman yang lebih holistik dapat diperoleh.

Dengan mengakui keterbatasan-keterbatasan

tersebut, penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan yang lebih mendalam dan kontekstual. Penelitian mendatang dapat diarahkan pada investigasi empiris mengenai bagaimana pedagogi emansipatoris diterapkan di ruang kelas, bagaimana guru mengelola dialog politik, serta bagaimana faktor eksternal seperti keluarga dan media berkontribusi terhadap perkembangan epistemologi politik anak. Upaya ini akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana literasi politik kritis dapat dibangun secara lebih sistematis dan efektif di tingkat pendidikan dasar.

E. Kesimpulan

Simpulan dari kajian ini menegaskan bahwa epistemologi politik di sekolah dasar masih didominasi oleh pola normatif-deklaratif yang membentuk pemahaman politik secara terbatas, berorientasi pada kepatuhan, dan jauh dari dinamika kekuasaan yang sesungguhnya. Relasi pengetahuan-kekuasaan yang dioperasikan melalui kurikulum, buku teks, dan otoritas guru berkontribusi besar dalam mereproduksi cara pandang politik

yang tidak kritis. Meskipun demikian, kajian ini menunjukkan bahwa siswa SD memiliki kapasitas epistemik yang kuat untuk berkembang menjadi subjek politik reflektif apabila diberi ruang dialog, pembelajaran berbasis pengalaman, dan fasilitasi pedagogis yang tepat. Dengan demikian, rekonstruksi epistemologi politik di SD menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn, tetapi juga untuk membangun fondasi literasi politik kritis yang esensial bagi demokrasi di era post-truth. Studi ini memberikan kontribusi penting dengan memperjelas bagaimana konstruksi pengetahuan politik terjadi sejak jenjang dasar dan menawarkan arah transformasi yang strategis bagi guru, sekolah, dan pembuat kebijakan untuk membangun pendidikan politik yang lebih inklusif, dialogis, dan emansipatoris.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, A., Sada, H. J., & Bahri, S. (2022). Analisis peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi

- politik bagi peserta didik. *Students' Difficulties at Elementary School in Increasing Literacy Ability*, 4(1), 1–12.
- Aeni, A. N., Khulqi, R., Latifa, D. A., & Inayah, A. N. (2022). Pemanfaatan video pembelajaran "Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin" sebagai media pembelajaran politik Islam siswa SD. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(4), 979. <https://doi.org/10.35931/am.v6i4.1097>
- Azhar, M. (2015). Rekonstruksi epistemologi pemikiran politik Islam Indonesia kontemporer. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 71–82.
- Dakhi, O. (2023). Penguatan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 7(1), 55–67.
- Darnely, P., Juwita, M., & Lestari, N. (2025). Pemahaman politik dan pendidikan karakter di sekolah dasar. *Jurnal Civic Media*, 6(2), 210–223.
- Datuzuhriah, A., Rahayu, S., & Mutia, R. (2025). Model pembelajaran dialogis dalam penguatan literasi politik siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 15(1), 112–124.
- Fernando, D. A., & Ismail, F. (2023). RAUDHAH proud to be professionals. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 8, 1110–1121.
- Hanifa Al Izati, H., Lindary, W., Putra, N. A., Ihsan, N., & Zahara, A. E. (2023). Systematic Literature Review (SLR) strategi pemasaran perbankan syariah di Indonesia. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 16(2), 258–266. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v16i2.1195>
- Herwani, H. (2022). Kompetensi guru dalam pembelajaran politik di sekolah dasar. [Nama jurnal tidak tersedia].
- Hindun, N. S., Ulya, I., & Alnashr, M. S. (2021). Pendidikan politik bagi anak melalui organisasi siswa madrasah ibtidaiyah. *Dawuh Guru: Jurnal Pendidikan MI/SD*, 1(1), 27–40.
- Ichwani, S., Putri, A. S., & Rahman, F. (2025). Analisis buku teks PKn sekolah dasar dari perspektif wacana kritis. *Jurnal Kajian Pendidikan*, 14(1), 33–47.
- Sila, I. M. (2024). Membangun kesadaran hukum warga negara melalui pendidikan

- kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8–14. <https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.49>
- Ismail, R. P., Monoarfa, F., & Aries, N. S. (2023). Pengetahuan politik pada anak usia sekolah dasar. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(2), 13114–13123.
- Karolčík, Š., Steiner, J., & Čipková, E. (2025). Politics and political literacy in education from the perspective of the public. *Cogent Education*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2457560>
- Kholis, M., & Aniati, R. (2022). Pendidikan politik anak di era digital. *Journal of Primary Education*, 6(4), 289–298.
- Literasi, P. (2025). *Tantangan post-truth dalam ruang publik Indonesia pasca pemilihan umum 2024*. [Informasi publikasi tidak lengkap].
- Madiun, U. P. (2025). Peningkatan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran PPKn dengan model problem-based learning berbasis TPACK. [Nama jurnal tidak tersedia].
- Mahfuzah, N., Rofiah, S., & Lestari, T. (2025). Narasi kebangsaan dalam buku ajar sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Kebangsaan*, 13(1), 78–92.
- Maslan, D. (2025). Politik sebagai mata pelajaran mandiri: Solusi untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 5(1), 195–208.
- Miharja, M., Hasanah, N., Pesik, H. H., Hadi, L., Kurnia, S., Zaini, A., Arifni, D. (n.d.). Menjadikan guru sebagai agen perubahan dengan menerapkan pola pendidikan revolusi mental di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta. [Informasi publikasi tidak lengkap].
- Mujianto, G., Setiawan, A., & Inderasari, E. (2025). Analisis pragmatisme kekuasaan interaksi guru. [Nama jurnal tidak tersedia, 21, 236–252].
- Najm Al Inu, A. N., Fitriani, D., Bani, E. A. S., & Winandar, M. L. (2023). Peran guru sebagai agen pembaharu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang inovatif di sekolah dasar. *Journal on Education*, 5(2), 1696–1701.
- Putri, W., Kurniawan, M. A., & Nuraini, N. (2024). Peran guru dalam

- membentuk karakter siswa. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(4), 1–14. tahun 2024. *Lebah*, 18(2), 109–117.
- Rosa, A. M., & Meireri, R. (2024). Pemahaman politik dalam membangun kewarganegaraan sejak dini pada siswa SD Negeri 10 Kayuagung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2). [Halaman tidak tersedia].
- Sekolah, H., & Tarbiyah, T. I. (2022). Peran guru sebagai pelaku perubahan. *Educational Journal: General and Specific Research*, 2, 391–396.
- Sihotang, S. S., & Mustika, M. (2024). Pengetahuan politik di kalangan siswa: Studi kasus pada siswa sekolah dasar. [Nama jurnal tidak tersedia, 2(1), 66–75].
- Sulistiawati, A., & Prastowo, A. (2021). Penggunaan PhET sebagai media interaktif pembelajaran IPA pada kelas IV sekolah dasar. *Pendas: Primary Education Journal*, 2(2), 138–147.
- Tambunan, A. B., & Sinulingga, K. (2025). *Jurnal Pengembangan dan Penelitian Pendidikan*, 07(2), 161–175.
- Utami, I. S., Wahidin, D., & Sugiyanto. (2025). Pendidikan politik bagi generasi muda dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak